

UPAYA UNI AFRIKA MENYELESAIKAN KONFLIK LIBYA 2011-2012

ANNISA HANDINI (20120510341)

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Indonesia.

annisahandini@yahoo.com

Abstrak

Uni Afrika (*African Union*) merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 2002. Sebagai organisasi yang mewakili kawasan Afrika dan untuk mempertahankan stabilitas keamanan di Afrika, maka Uni Afrika berupaya fokus pada konflik atau perang yang terjadi di Libya pada tahun 2011. Perang Sipil Libya pada tahun 2011 adalah konflik bersenjata yang terjadi di negara Libya untuk menuntut mundur pemimpin Libya, Moammar Qaddafi, yang sudah 42 tahun berkuasa. Para pengunjung rasa menyerukan adanya kepemimpinan baru dan pemilu yang demokratis. Konflik dimulai dengan serangkaian protes dan konfrontasi pada tanggal 15 Februari 2011 di Benghazi.

Dari sudut diplomatik, Qaddafi menawarkan perundingan dengan pemimpin oposisi melalui perwakilannya namun para pemberontak dengan lantang menolaknya. Mereka berjanji untuk terus berjuang hingga Qaddafi benar-benar mengundurkan diri atau dikalahkan secara militer. Situasi kemudian meningkat menjadi konflik bersenjata, dengan pemberontak mendirikan koalisi bernama National Transitional Council atau Dewan Transisi Nasional yang berbasis di Benghazi.

Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Uni Afrika lebih mengedepankan upaya perdamaian daripada menggunakan intervensi militer karena prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Uni Afrika adalah menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian. Uni Afrika menggunakan beberapa cara untuk berkontribusi dalam menyelesaikan konflik di Libya. Beberapa diantaranya adalah dengan mengupayakan untuk pertemuan Roadmap dan diimplementasikan tanpa menggunakan intervensi militer, dengan salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan identitas dan

pengakuan NTC, juga peran *The African Union Observer Mission* dalam perubahan institusi di Libya.

Keywords : *Upaya, Uni Afrika, Konflik Libya 2011-2012*

I. PENDAHULUAN

Uni Afrika (African Union) merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 2002. Organisasi ini adalah penerus dari Organisasi Persatuan Afrika (Organization of African Unity), atau organisasi antar-pemerintah untuk negara-negara Afrika yang didirikan pada tahun 1963 dan bekerja untuk membawa negara-negara Afrika mendapatkan dan memperkuat kemandirian mereka dari Negara-negara Eropa yang telah memerintah mereka dengan kekerasan selama beberapa dekade. OAU dibuat dengan tujuan untuk memperkuat integrasi antar negara-negara anggota dan memperkuat suara Afrika di kancah internasional.¹

Dengan berakhirnya Perang Dingin, pembebasan akhir dari Afrika Selatan, dan terbentuknya kembali Afrika di panggung politik internasional, maka para kepala negara di Afrika mengakui bahwa kerangka OAU tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan Afrika dalam mengkoordinasi kebijakan benua yang lebih besar dan menumbuhkan perekonomian yang lebih pesat. Maka pada 9 Juli 2002, terbentuk lah Uni Afrika yang digelar di Durban, Afrika Selatan. Tujuannya adalah untuk mencapai persatuan dan solidaritas antara negara-negara Afrika dan bangsa Afrika yang lebih besar; mempromosikan dan membela posisi Afrika di kancah global; mendorong kerjasama internasional; membangun kondisi yang memungkinkan untuk Afrika agar dapat memainkan peran yang sah dalam perekonomian global dan dalam negosiasi internasional; mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan integrasi ekonomi di Afrika; memajukan pembangunan benua melalui penelitian di segala bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; juga menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian.²

Pada tahun 2011 salah satu negara anggota Uni Afrika yaitu Libya menjadi fokus penting dari isu keamanan di Afrika, karena selain Libya merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, konflik ini juga dapat memicu tersebarnya virus demokratisasi ke negara-negara lain di kawasan Afrika dan akan mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Afrika jika tidak segera diatasi.

Krisis Libya tahun 2011 atau yang dikenal dengan perang sipil Libya tahun 2011 adalah konflik yang merupakan bagian dari isu Arab Spring atau Musim Semi Arab. Perang ini diawali oleh unjuk rasa di Benghazi pada 15 Februari 2011, untuk menuntut mundur pemimpin Libya, Muammar al-Qaddafi, yang sudah lama berkuasa. Akibat tindakan represif pemerintah dalam mengatasi pemrotes, protes ini mengalami eskalasi menjadi sebuah pemberontakan dan perang saudara. Pasukan oposisi dan pemerintah

1 Diedre. L Badejo. 2008. *The African Union*. New York: Chelsea House.

2 OSISA and Oxfam. 2010. *Strengthening Popular Participation in the African Union*. A Guide to AU Structures and Processes.

bertempur satu sama lain dalam perang yang dimulai kurang lebih akhir Februari silam.³ Perang ini juga mengakibatkan ribuan warga Libya mengungsi ke tempat yang lebih aman, sementara kedua kelompok bersenjata itu saling serang dengan senapan, meriam anti-pesawat dan roket. Namun, banyak warga dilaporkan terperangkap di lokasi pertempuran itu.⁴ Perang sipil Libya juga merupakan salah satu revolusi sosial-politik yang terjadi di Jazirah Arab bersama-sama dengan Tunisia dan Mesir. Kasus ini bukan terjadi secara euforia, yaitu adanya dependensi antara negara dengan negara lain pada satu kawasan yang sama, namun dilatarbelakangi oleh berbagai problematika yang kompleks.

Pada tahun 2011 kondisi sosial-politik Libya mengalami destabilisasi yang berujung pada terjadinya krisis yang dikenal dengan perang sipil Libya tahun 2011. Kasus ini menimbulkan kerugian perekonomian serius bagi Libya, selain itu, krisis Libya tahun 2011 juga menyebabkan korban jiwa, baik dari pihak pemerintah ataupun kelompok demonstran anti pemerintah yang kemudian berujung pada jatuhnya rezim Moammar Qaddafi.⁵

The International Criminal Court atau Pengadilan Pidana Internasional telah memperingatkan Qaddafi bahwa ia dan anggota pemerintahannya terbukti telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶ Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional mengutuk kekerasan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil di Libya dan pada 26 Februari 2011, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat sepakat untuk merujuk situasi yang sedang berlangsung di Libya untuk Mahkamah Pidana Internasional, memberlakukan embargo pada Libya Arab Jamahiriya itu, termasuk penyediaan personil tentara bayaran, membekukan aset keuangan Muammar Qaddafi dan anggota keluarga tertentu, juga memberlakukan larangan perjalanan pada Qaddafi, anggota keluarga tertentu dan penasihat senior.

Dengan adanya krisis ini maka Uni Afrika sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Afrika serta berwenang untuk mengatasi konflik yang terjadi di negara – negara Afrika, harus memiliki kontribusi terhadap penyelesaian konflik di Libya.

II. KERANGKA TEORI

Konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Konsep Organisasi Internasional dan Konsep Resolusi Konflik.

1. Konsep Organisasi Internasional

Menurut Sumaryo Suryokusumo, organisasi internasional adalah:

3 http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Saudara_Libya diakses pada 19 Mei 2015

4 <http://www.voaindonesia.com/content/libya-dilanda-konflik-terparah-sejak-2011/1961696.html> diakses pada 19 Mei 2015

5 Agus Siyadi. 2012. Latar Belakang Perang Sipil di Libya Tahun 2011. *Jurnal*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

6 Landen Garland. 2012. 2011 Libyan Civil War. New Delhi: White Word Publications.

“Suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul”.

Uni Afrika muncul sebagai wadah yang mewakili suara para negara anggotanya. Walaupun memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan intervensi militer dengan tujuan untuk mengurangi pertikaian yang timbul, konflik Libya tahun 2011 telah menjadi contoh kasus yang berbeda. Uni Afrika sama sekali tidak menggunakan intervensi militer melainkan lebih jauh menolak adanya intervensi militer asing untuk mengurangi pertikaian yang timbul dan mempromosikan perdamaian di kawasan Afrika.

Kebijakan ini sangat berbeda dengan kebijakan yang diambil kebanyakan aktor internasional. Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri telah mengeluarkan resolusi 1970 dan 1973 yang mengisyaratkan digunakannya segala cara untuk menyelesaikan konflik. NATO dengan kapabilitasnya kemudian menterjemahkan resolusi ini untuk melakukan intervensi militer. Uni Afrika sendiri membentuk komite sementara dan mengupayakan political roadmap sebagai bentuk solusi yang ditawarkan kepada pihak bertikai yang diwakili pemerintahan Qaddafi dan pihak oposisi yang diwakili oleh National Transitional Council (NTC).⁷

2. Teori Resolusi Konflik

Menurut John W Burton, resolusi konflik merupakan “Suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan”.⁸

Peter Wallensteen berpendapat bahwa, resolusi konflik mengandung tiga prinsip penting. Pertama, adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kedua, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subjek. Sikap ini sangat penting karena tanpa pengakuan tersebut, mereka tidak bisa bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan.⁹

Prinsip pertama yang dikemukakan oleh Peter Wallensteen mengenai adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak, dapat dilihat ketika langkah Uni Afrika dalam menegosiasikan dan membahas mengenai kesepakatan political roadmap (peta jalan politik) yang ditawarkan oleh The High Ad hoc Committee atau Komite Tinggi Ad hoc kepada para pemangku kepentingan di Libya.

7 Raphael Riando Rumampuk. 2014. Kebijakan Uni Afrika Tidak Menggunakan Intervensi Militer Dalam Penyelesaian Konflik Libya Tahun 2011. *Jurnal*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

8 John W Burton. 1990. *Conflict: Resolution and Prevention*. New York: St. Martins Press Inc.

9 Peter Wallensteen. 2002. *Understanding Conflict Resolution War, Peace, and the Global System*. London: SAGE Publications. Hal. 74-75.

Uni Afrika mengumumkan bahwa otoritas Libya telah setuju dengan roadmap yang dibentuk oleh Komite ad hoc Tingkat Tinggi AU untuk mengatasi krisis di Libya. Pejalan itu terdiri atas unsur-unsur berikut: Pertama, perlindungan warga sipil dan penghentian permusuhan. Kedua, bantuan kemanusiaan untuk para korban baik Libya dan pekerja migran asing, terutama dari Afrika. Ketiga, prakarsa dialog politik antara pihak-pihak Libya guna mencapai kesepakatan modalitas untuk mengakhiri krisis. Keempat, pembentukan dan pengelolaan suatu periode transisi inklusif. Terakhir, kelima, penerapan dan pelaksanaan reformasi politik yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi rakyat Libya

Kepentingan dari keterlibatan Uni Afrika adalah untuk mencegah menyebarnya virus demokratisasi di Libya ke negara-negara lain di kawasan Afrika. Selain itu, Uni Afrika juga memiliki kepentingan untuk memulihkan stabilitas pasokan minyak dan gas dunia. Libya sebagai negara penghasil minyak terbesar ke-9 di dunia dan negara yang paling kaya minyak di Afrika yang mengalami krisis politik, tentunya akan berimplikasi pada stabilitas energi dunia. Apalagi, negara-negara Afrika tentunya secara signifikan merasakan implikasi tersebut.¹⁰

Prinsip kedua yaitu setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subjek. Dalam hal ini, peran Uni Afrika adalah sebagai salah satu subjek dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di kawasan Afrika, telah terlihat jelas melalui peranan Dewan Keamanan dan Perdamaianya (Peace and Security Council) yang bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian, keamanan, pencegahan dan pengelolaan konflik. PSC berwenang dalam mengintervensi dan mengatasi konflik-konflik tersebut dalam bentuk diplomasi, peringatan, suspensi, sanksi dan misi perdamaian dan pemeliharaan di Afrika.¹¹ Uni Afrika sebagai organisasi yang mewakili Kawasan Afrika mampu menerima kehadiran aktor internasional lain dan bekerjasama dalam upaya penyelesaian krisis Libya dengan Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa, Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan negara-negara tetangga.

Prinsip ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan. Tujuan utama Uni Afrika adalah untuk menghindari perang. Sebagai organisasi regional, diplomasi adalah senjata utama Uni Afrika dan penggunaan kekuatannya maka penggunaan kekerasan selalu menjadi jalan terakhir ketika semua pilihan lain telah habis. Jika Libya stabil dan demokratis maka hal itu akan menjadi aset luar biasa bagi benua Afrika. Sebaliknya, jika Libya tidak stabil maka akan mempengaruhi lingkungan Afrika dan sekitarnya.

Oleh karena itu ketika Uni Afrika menawarkan roadmap dan pihak Libya menyetujuinya, hal itu termasuk kedalam proses pembangunan rasa saling percaya. Ketika konflik Libya telah berakhir dengan kematian Moammar Qaddafi, dan Libya membuka lembaran baru, maka pada tanggal 20 Agustus 2011 Uni Afrika mengakui NTC (National Transitional Council of Libya) sebagai wakil dari rakyat Libya karena mereka membentuk pemerintahan transisi inklusif. Selain itu, mengingat jaminan resmi yang disediakan oleh NTC dan dengan mempertimbangkan keunikan situasi di Libya,

10 http://www.kompasiana.com/arnaldinasrum/politik-kepentingan-dalam-krisis-libya_550d6392813311572cb1e291 diakses pada 05 Juni 2015

11 http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=56471 diakses pada 04 Juni 2015

pemerintah sementara memiliki wewenang untuk menduduki kursi Libya di AU. Hal itu juga membuat Uni Afrika bersedia mendirikan kantor penghubung AU di Tripoli untuk membantu menstabilkan situasi di negara itu, mempromosikan rekonsiliasi nasional dan memfasilitasi proses transisi.¹²

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yang memiliki tujuan untuk memaparkan peran Uni Afrika terhadap konflik di Libya tahun 2011, dimana pemberontakan terhadap rezim Moammar Qaddafi dimulai. Para demonstran terlibat dalam bentrokan berdarah dengan pendukung Qaddafi dan polisi. Sepuluh hari kemudian tidak ada pemerintahan yang tersisa di Benghazi.¹³ Hingga pada tahun 2012, ketika GNC (*General National Congress*) terpilih dalam pemilihan umum Libya menggantikan NTC (*National Transitional Council*).

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik kepustakaan (*library reseach*). Yakni dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, berita dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

IV. PEMBAHASAN

A. Pertemuan Roadmap

Pada pertemuan ke 265 yang diselenggarakan pada 10 Maret 2011, AU mengadakan pertemuan puncak di tingkat Kepala Negara dan Pemerintahan dan mendirikan High Level Ad hoc Commitee atau Komite Tinggi Ad hoc untuk membahas mengenai isu di Libya dan menemukan solusi kedepan. Komite Tinggi Ad hoc itu terdiri dari para pemimpin Kongo (Brazzaville), Mauritania, Mali, Afrika Selatan dan Uganda. Komite ini, yang dipimpin oleh Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, menyepakati roadmap atau peta jalan untuk menyelesaikan krisis Libya. Adapun peta jalan atau roadmap yang dimaksudkan berisi tentang :

1. Penghentian segera permusuhan di Libya;
2. Kerjasama dari pihak berwenang Libya yang bersangkutan untuk memfasilitasi pengiriman tepat waktu dari bantuan kemanusiaan kepada penduduk miskin;
3. Perlindungan warga negara asing, termasuk pekerja migran Afrika yang tinggal di Libya;
4. Bantuan kemanusiaan;
5. Dialog antara pihak Libya dan pembentukan government. Transisi konsensual dan inklusif.¹⁴

12 <http://www.pambazuka.net/en/category.php/aumonitor/78691> diakses pada 10 Juni

13 <http://www.dw.com/en/libya-chronology-of-a-revolt-against-a-dictator/a-15335165> diakses pada 18 Oktober 2015

Delegasi Tripoli pada pertemuan itu dipimpin oleh Mohammed al-Zwai, Sekretaris Jenderal Kongres Rakyat Umum. Pernyataan itu menyeru masyarakat internasional mewajibkan "pihak-pihak lain" dalam konflik untuk menghormati gencatan senjata.¹⁵ Lebih dari itu, di Benghazi, diskusi dengan pimpinan NTC difokuskan pada kebutuhan untuk mendesak gencatan senjata. NTC menolak untuk mengakui atau menerima permintaan AU komite ad-hoc, kecuali jika Qaddafi akan melepaskan kekuasaannya sebelum adaptasi Roadmap dari AU. Karena sekali lagi, tujuan AU adalah untuk memastikan perlindungan yang efektif dari penduduk sipil dan menciptakan suasana kondusif bagi pemenuhan tuntutan sah rakyat Libya.¹⁶

B. Keputusan Uni Afrika Tidak Menggunakan Intervensi Militer Dalam Konflik di Libya

Seperti di negara-negara lain yang terkena dampak *Arab Spring* atau "musim semi Arab", dalam kasus Libya, Uni Afrika menjalankan aksinya pada kebutuhan tetap berkontribusi pada pencapaian keseluruhan, dan tujuan dari organisasi yang meliputi, perdamaian, stabilitas, demokratis, menghormati hak asasi manusia, keadilan, kemakmuran dan kesatuan.¹⁷

Keputusan Uni Afrika pada resolusi damai dari krisis Libya yang diselenggarakan di Addis Ababa, Ethiopia, pada tanggal 25 Mei 2011, dibuat untuk membicarakan tentang keadaan perdamaian dan keamanan di Afrika, terutama mengenai situasi di Libya. Pada saat itu Majelis menegaskan tentang pendiriannya bahwa hanya ada solusi politik untuk konflik Libya yang akan memungkinkan untuk AU untuk mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan di Libya dan memenuhi aspirasi sah rakyat Libya untuk menjalankan demokrasi, aturan hukum, menghormati hak asasi manusia dan memiliki pemerintahan yang baik, serta melestarikan persatuan dan integritas teritorial di Libya. Dalam hal ini, Majelis mendukung African Union (AU) Roadmap untuk Resolusi Krisis di Libya.¹⁸

Pada konflik Libya 2011, PBB dan Uni Afrika (AU) dianggap sulit bekerjasama untuk mencari solusi mufakat yang dapat diterima untuk krisis. Sebaliknya, dua organisasi internasional tersebut mengadopsi strategi resolusi konflik yang mencerminkan persepsi sangat berbeda dari situasi dan sikap yang juga berbeda terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Kurangnya upaya koordinasi mereka bahkan merugikan pelaksanaan tindakan penyelesaian konflik di Libya.

Untuk batas tertentu, pembagian peran di Libya adalah agar PBB dapat menanggapi kebutuhan mendesak untuk melindungi warga Libya dengan memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi, diplomatik dan militer, dan dengan suara untuk pembentukan zona larangan terbang. AU di sisi lain, dapat terlibat dalam menangani masalah jangka panjang

14 Wilson Kajwengye Twinomugisha. 2013. *The African Union's Response to the Libyan Crisis of 2011*. Johannesburg: University of The Witwatersrand. Hal. 6-7.

15 <http://kaltim.tribunnews.com/2011/03/26/khadafy-patuh-uni-afrika-siap-beraamai> diakses pada 18 Desember 2014 Pukul 3:50

16 *Ibid*, hal. 35

17 Hajara Aliyu Abubakar. 2014. *Role of African Union In Libyan Crises*. Sokoto: Usmanu Danfodiyo University. Hal. 30.

18 *Ibid*, hal 31.

yang membawa penyelesaian solusi politik untuk konflik dengan bertumpu pada dukungan dari para pemangku kepentingan Libya.

Di Libya, jika ada dialog awal antar pemangku kepentingan utama eksternal, termasuk PBB, kemudian organisasi regional yang relevan seperti AU, kontribusi dari negara-negara tetangga, dan konsultasi komprehensif yang melibatkan wakil rakyat Libya, maka secara otomatis akan membuahkan keputusan bersama dan menjadi tindakan kolektif untuk dilakukan. Pendekatan bersama dan terkoordinasi akan bermanfaat bagi proses perdamaian, baik dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang.

Namun, PSC tidak melakukan hal yang sama seperti DK PBB dan sebaliknya, PSC mengambil dua keputusan penting. Pertama, ia mendirikan sebuah roadmap melalui mana krisis Libya bisa diselesaikan. Kedua, PSC membentuk AU High Level ad hoc Committee (Komite ad hoc) pada Libya yang terdiri lima kepala negara dan pemerintahan, bersama-sama dengan ketua komisi. Panitia diberi mandat untuk: terlibat dengan semua pihak di Libya dan untuk terus menilai evolusi dari situasi di lapangan; memfasilitasi dialog inklusif antara pihak Libya pada reformasi yang sesuai; dan terlibat dengan mitra AU, khususnya Liga Arab (AL), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Uni Eropa (UE) dan PBB untuk memfasilitasi koordinasi upaya dan mencari dukungan mereka untuk resolusi awal krisis.¹⁹

C. Pemenuhan Identitas dan Pengakuan NTC (National Transitional Council) Sebagai Pemerintahan Transisi Sah di Libya.

Hingga berakhirnya kekuasaan (rezim) Kolonel Muammar Qaddafi, telah lebih 30 negara mengakui Dewan Transisi Nasional Libya (Libyan National Transition Council) sebagai penguasa (yang memerintah) sementara di Libya. Pasca jatuhnya rezim Kolonel Muammar Qaddafi, NTC juga telah berupaya menggalang dukungan internasional untuk memberikan bantuan baik secara finansial maupun pengakuan secara de facto maupun de jure (pengakuan dunia) kepada NTC sebagai pihak yang berkuasa saat ini di Libya. NTC menginginkan adanya proses peralihan kekuasaan secara damai sebelum terbentuknya pemerintahan yang sah di Libya.

Pemimpin NTC, Mustafa Abdul Jalil yang juga bekas orang kepercayaan Kolonel Moammar Qaddafi berupaya keras untuk mengkonsolidasikan kekuatan NTC untuk mempersiapkan proses menuju pemerintahan yang diakui oleh dunia internasional. NTC memerlukan waktu lebih kurang 18 bulan menuju proses tersebut. Sebagai pihak oposisi yang menentang kekuasaan Kolonel Muammar Qaddafi di Libya, keberadaan NTC sebagai pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent) mendapat tempat oleh dunia internasional terutama oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti Perancis, Inggris dan Italia.²⁰

Maka pada tanggal 20 Agustus 2011 Uni Afrika mengakui NTC (National Transitional Council of Libya) sebagai wakil dari rakyat Libya karena mereka membentuk pemerintahan transisi inklusif. Selain itu, mengingat jaminan resmi yang disediakan oleh NTC dan dengan mempertimbangkan keunikan situasi di Libya, pemerintah sementara

19 Kasaija Phillip Apuuli. 2011. The Principle of 'African solutions to African Problems' under the spotlight: The African Union (AU) and the Libya Crisis. *Jurnal*. Uganda: University Kampala. Hal. 3-5.

20 <http://www.riapos.co/215-opini-akhir-rezim-khadafi-dan-keberadaan-ntc-.html#.VoxsyfmLTIU> diakses pada 6 Januari 2016 Pukul 8:28

memiliki wewenang untuk menduduki kursi Libya di AU. Hal itu juga membuat Uni Afrika bersedia mendirikan kantor penghubung AU di Tripoli untuk membantu menstabilkan situasi di negara itu, mempromosikan rekonsiliasi nasional dan memfasilitasi proses transisi.²¹

D. Peran The African Union Observer Mission Terhadap Perubahan Institusi di Libya

Meskipun fakta bahwa Dewan Transisi Nasional (NTC) memegang kendali, namun dewan yang telah memerintah negara itu sejak akhir perang saudara Libya akhirnya mundur. Pada Rabu 8 Agustus 2012, Dewan Transisi Nasional Libya (National Transitional Council/NTC) menggelar sebuah acara penyerahan kekuasaan secara damai kepada kongres baru Libya, GNC (General National Congress). Penyerahan kekuasaan dilakukan oleh kepala NTC Libya, Mustafa Abdel Jalil, kepada 200 orang anggota kongres yang terpilih secara demokratis dalam pemilu 7 Juli 2012 lalu di Tripoli dan menjadikan Mohammed Magarief sebagai Kepala Negara .

Perubahan Institusi ini disebabkan oleh adanya aksi demo dari ratusan orang yang mendesak pimpinan Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya, Mustafa Abdel Jalil, agar turun dari jabatannya.²²

V. KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh Uni Afrika pada konflik yang terjadi di Libya tahun 2011-2014 patut diberikan apresiasi karena adanya perwakilan dari Afrika untuk menyelesaikan masalah di kawasan Afrika. Selain itu, Uni Afrika lebih memilih menyelesaikan konflik dengan jalan damai daripada menggunakan intervensi militer seperti upaya zona larangan terbang yang dilakukan oleh PBB sehingga Uni Afrika dapat sekaligus mempromosikan perdamaian di kawasan Afrika.

Dengan dilakukannya roadmap Uni Afrika berharap akan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Libya dan memenuhi aspirasi sah rakyat Libya untuk menjalankan demokrasi, aturan hukum, menghormati hak asasi manusia dan memiliki pemerintahan yang baik, serta melestarikan persatuan dan integritas teritorial di Libya.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Uni Afrika yaitu menjalin kerjasama internasional, seperti PBB, Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan negara-negara tetangga lainnya. Meskipun adanya prinsip yang bersebrangan antara Dewan Keamanan PBB yang lebih memilih jalur intervensi militer, dan Uni Afrika yang lebih mengedepankan resolusi politik, namun sebenarnya hal itu dapat menjadi pelengkap untuk menjadi resolusi jangka pendek dan jangka panjang untuk krisis di Libya. PBB dapat berperan untuk mengatasi masalah mendesak seperti memberlakukan sanksi ekonomi, dan militer untuk melindungi warga Libya. Sedangkan Libya dapat terlibat dalam menangani masalah jangka panjang dengan jalan diplomasi politik.

21 <http://www.pambazuka.net/en/category.php/aumonitor/78691> diakses pada 6 Januari Pukul 00.59

22 Giliran NTC Dipaksa Mundur Oleh Rakyat Libya. Terdapat pada website: <http://news.okezone.com/read/2011/12/13/412/541559/giliran-ntc-dipaksa-mundur-oleh-rakyat-libya> diakses pada 6 Januari 2016 Pukul 11:08

The Peace and Security Council (PSC) juga dinilai memiliki peran dalam menyelesaikan konflik di Libya karena selain PSC berhasil membentuk Komite Tinggi ad-hoc untuk bertemu dan berinteraksi dengan pihak Libya, hasil dari pertemuan itu pun menegaskan perlunya solusi politik untuk menyerukan agar dapat segera mengakhiri semua serangan terhadap warga sipil dan gencatan senjata yang akan mengarah pada pembentukan konsensus periode transisi, yang berpuncak pada pemilu yang akan memungkinkan Libya untuk memilih secara bebas pemimpin mereka.

Dan yang terakhir, untuk langkah yang diambil oleh Uni Afrika pada konflik Libya yang kembali pecah pada tahun 2014 adalah sama, yakni tidak adanya intervensi militer. Solusi damai dan promosi rekonsiliasi di Libya adalah yang dipilih oleh Uni Afrika untuk terus berupaya mengamankan stabilitas politik di Libya. Meskipun solusi tersebut bukan berarti akan menyelesaikan konflik jangka pendek, namun diharapkan solusi tersebut akan menyelesaikan konflik jangka panjang yang terjadi di Libya.

Uni Afrika sendiri melalui The AU Observer Mission, berperan melakukan pemantauan pada pemilihan umum the General National Congress (GNC) yang diselenggarakan pada 7 Juli 2012 dengan semangat yang diambil dari Deklarasi Durban mengenai Prinsip Pemerintahan Pemilu Demokrasi di Afrika, dan diadopsi oleh Majelis Uni Afrika pada bulan Juli 2002 serta Piagam Afrika tentang Demokrasi, Pemilu dan Pemerintahan yang mulai berlaku pada 15 Februari 2012. Tujuan utama dari Misi ini adalah untuk membuat pelaksanaan pemilu berjalan secara jujur, independen dan tidak memihak. Sedangkan misi objektif dari The AU Observer Mission adalah:

1. Menilai apakah kondisi ada selama pelaksanaan pemilihan yang memungkinkan orang-orang Libya untuk bebas mengekspresikan keinginan mereka
2. Menilai dan menentukan apakah pemilu dilakukan sesuai dengan kerangka hukum pemilu di Libya dan
3. Menilai apakah hasil akhir mencerminkan kehendak rakyat Libya.²³

DAFTAR PUSTAKA

Badejo, D. L. 2008. *The African Union*. New York: Chelsea House.

OSISA and Oxfam. 2010. *Strengthening Popular Participation in the African Union. A Guide to AU Structures and Processes*.

Siyadi, Agus. 2012. *Latar Belakang Perang Sipil di Libya Tahun 2011*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

23 AFRICAN UNION. "The African Union Observer Mission To the 7th July 2012. General National Congress Election In Libya". Preliminary Statement. Addis Ababa: African Union, 2012. Hal.2.

Rumampuk, R.R. 2014. *Kebijakan Uni Afrika Tidak Menggunakan Intervensi Militer Dalam Penyelesaian Konflik Libya Tahun 2011*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Burton, J. W. 1990. *Conflict: Resolution and Prevention*. New York: St. Martins Press Inc.

Wallensteen, Peter. 2002. *Understanding Conflict Resolution War, Peace, and the Global System*. London: SAGE Publications. Hal. 74-75.

Abubakar, Hajara Aliyu. 2014. *Role of African Union In Libyan Crises*. Sokoto: Usmanu Danfodiyo University. Hal. 30.

Twinomugisha, Wilson Kajwengye. 2013. *The African Union's Response to the Libyan Crisis of 2011*. Johannesburg: University of The Witwatersrand. Hal. 6-7.

Apuuli, Kasaija Phillip. 2011. *The Principle of 'African solutions to African Problems' under the spotlight: The African Union (AU) and the Libya Crisis*. Jurnal. Uganda: University Kampala. Hal. 3-5.

African Union. 2014. THE AFRICAN UNION CONCERNED BY THE UPSURGE OF VIOLENCE IN LIBYA. Press Release. Addis Ababa: 22 Oktober.

http://www.kompasiana.com/arnaldinasrum/politik-kepentingan-dalam-krisis-libya_550d6392813311572cb1e291 diakses pada 05 Juni 2015

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=56471 diakses pada 04 Juni 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Saudara_Libya diakses pada 19 Mei 2015

<http://www.voaindonesia.com/content/libya-dilanda-konflik-terparah-sejak-2011/1961696.html> diakses pada 19 Mei 2015

<http://syamina.org/syamina91-Memahami-Konflik-Libya-Ansharusy-Syariah-sebagai-Pemain-Kunci.html> diakses pada 18 Oktober 2015

<http://www.pambazuka.net/en/category.php/aumonitor/78691> diakses pada 10 Juni

<http://www.dw.com/en/libya-chronology-of-a-revolt-against-a-dictator/a-15335165> diakses pada 18 Oktober 2015

<http://unu.edu/publications/articles/global-regional-partnerships-for-peace-libya.html> diakses pada 20 Desember 2015

<http://www.au.int/en/organs/psc> diakses pada 19 Desember 2015

<http://kaltim.tribunnews.com/2011/03/26/khadafy-patuh-uni-afrika-siap-beraamai> diakses pada 18 Desember 2014

<http://news.okezone.com/read/2011/12/13/412/541559/giliran-ntc-dipaksa-mundur-oleh-rakyat-libya> diakses pada 6 Januari 2016

<http://www.riapos.co/215-opini-akhir-rezim-khadafi-dan-keberadaan-ntc.html#.VoxsyfmLTIU> diakses pada 6 Januari 2016

